



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 17 Februari 2025

Halaman: 2

Pemkot Jamin Tidak Ada Pengurangan Pegawai

Pelayanan Kesehatan dan Sampah Tetap Prioritas Meski Ada Efisiensi Anggaran

JOGIA - Kebijakan penghematan anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 dipastikan tidak berdampak pada pengurangan pegawai di lingkungan Pemkot Jogja. Baik itu tenaga honorer maupun kar-

yawan *outsourcing* yang bekerjasama dengan pemkot.

Pj Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto mengatakan, kebijakan efisiensi tersebut tidak akan mengurangi jumlah pegawai di Pemkot Jogja. Dalam artian, meski pemerintah melakukan penghematan anggaran, tidak ada satupun pegawai maupun karyawan yang akan dirumahkan.

Sugeng menjelaskan, pemkot saat ini tidak lagi menggunakan tenaga harian lepas (THL). Sehingga sistem kepegawaian yang berlaku hanya tenaga honorer



PIHAK KETIGA YANG BERWENANG

- Jika pun ada pengurangan karyawan *outsourcing*, hal itu bukanlah kebijakan pemkot.

- Pengelolaan karyawan *outsourcing* kewenangan pihak ketiga. PHK berkaitan performa karyawan, bukan akibat dari kebijakan efisiensi.

GRAFIK: HERPPI KARTUNIRADAR JOGJA

yang sudah diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta karyawan *outsourcing* yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

"Untuk gaji PPPK, kami pastikan tidak ada dampak dari

kebijakan efisiensi ini," katanya, kemarin (16/2).

Kondisi yang sama juga terjadi pada karyawan *outsourcing*. Sebab pemkot sudah memperhitungkan alokasi anggaran untuk gaji karyawan

outsourcing melalui pembayaran kepada pihak ketiga.

"Jadi memang untuk hal-hal wajib mengikat sudah kami kondisikan," ujarnya.

Menurutnya, jika pun ada pengurangan karyawan *outsourcing*, hal itu bukanlah kebijakan pemkot. Karena pengelolaan karyawan *outsourcing* sudah menjadi kewenangan pihak ketiga. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja lebih berkaitan dengan performa karyawan, bukan akibat dari kebijakan efisiensi

Pun, dampak efisiensi anggaran juga tidak akan mengganggu program-program prioritas. Sehingga program-program yang berkaitan dengan penanganan masalah sampah, bantuan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami pastikan anggaran berjalan efisien, tapi pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu," tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mendukung kebijakan pemkot untuk tetap menjalankan pro-

gram-program prioritas. Terkhusus penanganan sampah dan pelayanan kesehatan.

Sebab, sektor kesehatan dan penanganan sampah merupakan hal yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Sehingga kedua program tersebut harus tetap berjalan meskipun ada penghematan.

"Kami tekankan kesehatan dan sampah wajib menjadi prioritas karena memiliki dampak langsung kepada masyarakat," terang politikus Partai Gerindra. (inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005